

# **KUOTA PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF**

**(Studi Deskriptif Tentang Mekanisme Rekrutmen Partai Politik Terhadap  
Calon Legislatif Perempuan dalam PEMILU 2004 di kota Malang )**

## **SKRIPSI**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**Oleh :**

**RICHA VIDYA YUSTIKANINGRUM**

**070116399**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2005/2006**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**KUOTA PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA  
LEGISLATIF**

**(Studi Deskriptif Tentang Mekanisme Rekrutmen Partai Politik Terhadap Calon  
Legislative Perempuan dalam PEMILU 2004 di Kota Malang)**

**Disusun Oleh :**

**Richa Vidya Yn**  
**NIM. 070116399**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada hari Kamis, 28 April 2005 dan telah dinyatakan  
Memenuhi syarat untuk diterima**

**Tim Penguji**  
**Ketua Penguji,**

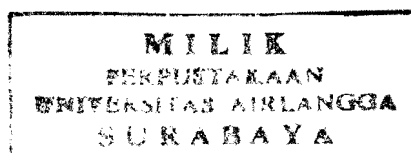
**Dra. Siti Aminah, MA**  
**NIP. 131836624**

**Anggota Penguji I,**

**Drs. Kacung Marijan, MA**  
**NIP. 131836623**

**Anggota Penguji II,**

**Dra. Dwi Windvastuti, MA**  
**NIP. 131801643**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

## ABSTRAK

**Nama** : Richa Vidya Yn  
**NIM** : 070116399  
**Judul** : Kuota Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif  
( Studi Deskriptif tentang Mekanisme Rekrutmen Partai Politik terhadap Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilu 2004 di Kota Malang )  
**Halaman** : 177 halaman  
**Pustaka** : 1985-2004  
18 buku  
2 jurnal  
Internet

Penelitian ini berjudul tentang tentang Kuota Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif yang dirumuskan dalam dua permasalahan yaitu pola rekrutmen partai politik terhadap caleg perempuan dalam Pemilu 2004 lalu di Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen partai politik terhadap caleg perempuan. Penelitian tentang pola rekrutmen partai politik dalam pencalonan perempuan dilakukan dengan teknik wawancara secara terbuka dan dokumentasi yang diperoleh dari KPU, partai politik yang diteliti, dimana data yang diperoleh akan diinterpretasikan dan disajikan secara naratif.

Dalam skripsi ini mekanisme rekrutmen partai politik dalam pencalonan perempuan di legislatif, masih berorientasi maskulin. Perempuan ditempatkan sebagai *supporting roles* bagi partai politik dalam rangka mendulang suara, melalui organisasi perempuan yang ada partai politik memanfaatkan agensi ini dalam merekrut caleg perempuan di partainya.

Pada proses rekrutmen Caleg berlangsung, kriteria formal dan informal telah dijalankan oleh partai politik, akan tetapi aspek *merit system* ( formal ) belum dapat dipenuhi secara optimal oleh partai politik dalam rekrutmen caleg. Hal ini dikarenakan partai politik masih bersifat partai kader dan ikatan kultural mengedepan, sehingga untuk dapat menjadi partai yang modern, partai politik harus menempatkan peran perempuan di partai tanpa bias gender yang akhirnya dapat meminimalkan ikatan kultural yang ada.

**Kata kunci** : kuota perempuan, merit system, supporting rules, orientasi maskulin

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **I.1 Kesimpulan**

Proses rekrutmen partai politik terhadap pencalonan perempuan di legislatif dalam Pemilu 2004 di Kota Malang, menggunakan mekanisme rekrutmen sederhana dan telah menjalankan ketetapan-ketetapan formal yang ada di setiap partai. Sistem formal ( merit system ) menjadi penting ketika perekrutan berlangsung, karena partai politik melibatkan agen-agen struktural.

Meski demikian, kembali pada upaya partai politik untuk mencapai keterwakilan perempuan di legislatif. Melihat partai politik masih bersifat maskulin dan perempuan masih dianggap subordinat, mekanisme rekrutmen untuk pemenuhan Caleg perempuan agar terpilih menjadi rendah. Sehingga posisi Caleg perempuan dalam rangka pemenuhan kuota mengalami ambivalensi.

Pada satu sisi, caleg perempuan oleh partai politik masih belum dapat diterima secara terbuka, terutama ketika melihat masih banyaknya caleg perempuan hanya ditempatkan sebagai “jadi caleg” bukan “caleg jadi”, terkait persoalan daftar urutan. Caleg perempuan hanya difungsikan sebagai pendulang suara bagi partainya. Di sisi lain, keberadaan caleg perempuan ternyata hanya untuk menunjukkan bahwa partai tersebut sekedar berupaya memenuhi kuota, walaupun pada kenyataannya penempatan caleg perempuan masih belum proporsional dan tidak merata.

Mekanisme rekrutmen caleg perempuan secara sederhana ini berawal dari tersedianya kader-kader perempuan di partai politik. Kader perempuan secara kuantitas cukup besar, akan tetapi keberadaan mereka yang kurang terakomodasi secara tepat oleh agen-agen rekrutmen yang ada di setiap partai sehingga proses rekrutmen caleg perempuan menjadi kurang optimal. Ketika proses perekrutan caleg, partai politik menetapkan kriteria-kriteria formal, tetapi untuk hasil seleksi akhir ternyata pertimbangan pimpinan partai sebagai kontrol lebih mengedepan, dimana meliputi persoalan dedikasi, loyalitas, profesionalitas, senioritas, kapabilitas serta akseptabilitas dari caleg bersangkutan.

Ketika hal tersebut ditetapkan, memberikan nilai dan peluang rendah bagi caleg perempuan. Kuatnya *stereotype* terhadap kepemimpinan perempuan, seperti keraguan terhadap kemampuan dan kualitas perempuan sebagai mitra laki-laki dalam pengambilan keputusan politik menjadi suatu kendala bagi partisipasinya.

Dengan melihat realitas tersebut, ketika proses rekrutmennya, Caleg perempuan mengalami beberapa kendala, diantaranya :

- a. Kendala Sosial, Caleg perempuan agar terpilih harus dikenal massa pemilihnya sebagai "*Public Figure*"
- b. Kendala Politik, Caleg perempuan yang aktif hingga organisasi akar rumput harus memiliki basis dukungan, finansial, kader partai dan aspek *political will* dari partai bersangkutan
- c. Kendala Budaya, keberadaan perempuan dalam kontrol kekuasaan ideologi patriarki.

substansi kuota, menjadikan kuota dijalankan dengan setengah hati. Misalnya partai politik dalam perekrutan dan penempatan urutan caleg perempuan.

Kuota yang disosialisasikan melalui UU No 12 Tahun 2003 kurang mengikat partai politik dan perlu disertakan sanksi tegas, baik moral maupun finansial sebagaimana diterapkan di negara Argentina dan Perancis yang telah berhasil dalam pelaksanaan kuota di legislatif.

Sebagai strategi untuk memperbaiki penempatan urutan caleg perempuan agar tidak lagi berada di nomor bawah untuk setiap daerah pemilihan, maka keterwakilan 30% bukan untuk menjadikan perempuan sebagai caleg saja, tetapi 30% perempuan harus terpilih sebagai anggota legislatif. Seperti ketika penempatan nomor urutan caleg, partai politik dapat menempatkan caleg laki-laki dan caleg perempuan secara bersilang, dimana jika caleg no.1 adalah laki-laki maka yang urutan kedua adalah perempuan dan sebaliknya di setiap daerah pemilihan.

Walaupun ini dirasakan sangat sulit, mengingat ikatan kultural partai politik yang mengedepan, tetapi ini adalah tantangan atas konsekuensi demokrasi partai politik untuk menunjukkan berfungsinya partai secara optimal sebagai agen rekrutmen caleg untuk duduk di legislatif. Melihat masyarakat yang responsif dan modern, maka partai politik hendaknya menjadikan partainya menjadi makin modern dengan memfungsikan partainya tidak hanya sebagai agen pengkader tetapi menempatkan peran perempuan di struktural partai tanpa bias gender.